

**THE UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION SCIENCE
POSTGRADUATE PROGRAM
PROGRAM STUDY OF ADMINISTRATION SCIENCE
MAJORING ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY**

ABSTRACT

**Silvia Andrianingsih
0606017725**

**POLICY IMPLEMENTATION OF STALLER ARRANGEMENT IN DKI JAKARTA
– A STUDY CASE OF CENTRAL JAKARTA**

**xii+143 Pages + 12 Tables + 13 Figures+ 3 Attachments
Bibliography : 18 Books, 2 Journals, 13 Legal Stipulation, 5 Previous
Researches, 11 Articles (year 1980 – 2008)**

The sporadic, yet unorganized location of stallers seems to indicate the absence of arrangement by the local government of DKI Jakarta especially Central Jakarta. Therefore, a reaserch has been conducted in order to find out the policy implementation of staller arrangement in DKI Jakarta with a case study of Central Jakarta aiming to (1) explain the policy implementation conducted by the local government of DKI Jakarta in arranging stallers; (2) elaborate factors contributing to the success and failure of the policy implementation.

There are four analyzing tools used: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure (Edward III. 1980 page. 9-10). Furthermore the analysis also conducted by considering the external factors in regards to Grindle (1980) saying that the success of policy implementation is influenced by two major variables namely content of policy and context of implementation. The research uses positivistic qualitative method and applies illustrative model in data analysis.

Research shows that the policy implementation is not only influenced by the internal factors, but also the external ones, such as *premanism* (bullying practices), people's responses, and monetary condition of the country. A set of recommendation is then given, such as enhancing the capability of the implementors both physically and intellectually, one stop training service by institution of Cooperation, Small and Middle Business to both formal and informal/illegal stallers, and conducting *premanism* eradication systematically together with the Police.

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

ABSTRAK

**Silvia Andrianingsih
0606017725**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DKI
JAKARTA – STUDI KASUS DI KOTA JAKARTA PUSAT**

**xii+143 Halaman + 12 tabel + 13 Gambar+ 3 Lampiran.
Daftar Pustaka: 18 Buku, 2 Jurnal, 13 Produk Hukum, 5 Hasil Penelitian, 11
Artikel (Tahun 1980 – 2008)**

Keberadaan PKL yang sporadis dan tak teratur mengesankan tidak ada penanganan yang jelas dari pemerintah DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat. Oleh karenanya dilakukan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan PKL di DKI Jakarta yang bertujuan untuk: (1) Menjelaskan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani PKL saat ini; (2) Memaparkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan implementasi penanganan PKL di DKI Jakarta.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 empat faktor atau variabel penting dalam kebijakan publik, yaitu: komunikasi (*communication*), sumber-sumber (*resources*), kecondongan (*dispositions*), atau perilaku (*attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Edward III. 1980 hal. 9-10). Selain itu analisis juga dilakukan dengan melihat beberapa faktor eksternal sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Penelitian dilakukan dengan metode positis kualitatif dengan menggunakan model analisis ilustratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal, seperti premanisme, sikap masyarakat dan kondisi perekonomian negara, Rekomendasi yang diberikan oleh penelitian antara lain meningkatkan kemampuan personel fisik dan wawasan, serta etika para pelaksanaan kebijakan, pembinaan satu atap oleh Dinas KUKM untuk PKL resmi dan ilegal, dan merancang upaya sistematis pemberantasan premanisme dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian.